

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang di bentuk pada 11 september 2016 memiliki nama lain yaitu BUMDes Wahana Mandiri. BUMDes Wahana Mandiri terletak di Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat. BUMDes Wahana Mandiri berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang mengembangkan usaha daam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BUMDes ini dapat di harapkan membantu masyarakat dan menjadikan usahanya lebih maju.

BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang terletak di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat yaitu berada di wilayah Langkat Hulu. BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang terletak diantara $03^{\circ} 29'22,92'' LU$ dan $98^{\circ} 12'55,32'' BT$. Letak BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang diatas permukaan laut : ± 110 meter.

2. Kegiatan Usaha BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

- a. Unit Usaha Penginapan Mess Desa
- b. Unit Usaha Depot Air Bersih Isi Ulang
- c. Unit Usaha Simpan Pinjam (SPP)
- d. Unit Usaha Ternak Ayam

3. Struktur Organisasi

- a. Struktur Organisasi

Susunan organisasi kepengurusan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bohorok terdiri dari :

Direktur BUM Des	: Ahmad Agus Salim, S.Pd
Sekretaris	: Eddy Riyanto

Bendahara :
Ernianta Br Sembiring
Kepala unit usaha SPP : Erwindo
Kepala unit usaha home industri : Dedi Irawan
Kepala unit usaha pembangunan : Liheli Prasugi, Amd

b. Visi dan Misi BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

1) Visi BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

- a) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Perkebunan Bukit Lawang melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan, desa wisata, sumber daya alam, kearifan lokal, pertanian, dan peningkatan pelayanan masyarakat.

2) Misi BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

- a) Pengembangan usaha ekonomi desa.
- b) Meningkatkan kerja sama antar desa.
- c) Menjalin mitra kerja sama.
- d) Menciptakan ruang kerja bagi masyarakat kurang mampu yang ada di desa.
- e) Membangkitkan kegiatan ekonomi kecil dan menengah lewat pengembangan berbagai kerajinan tangan dan industri rumahan.
- f) Memanfaatkan potensi sumber daya desa yang belum optimal.
- g) Meningkatkan ketahanan ekonomi dengan menggalakan usaha kerakyatan melalui program setrategis di bidang produksi pertanian, pemasaran, usaha kecil menengah serta pariwisata.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok. Sasaran penelitian ini yaitu bendahara Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2023, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mengenai perbandingan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan laporan keuangan BUM Desa dan dokumentasi berupa laporan keuangan jurnal uang masuk, uang keluar dan mutasi neraca BUM Desa.

Dalam hasil penelitian ini terdapat gambaran laporan keuangan yang berupa jurnal uang masuk, jurnal uang keluar, dan mutasi neraca periode desember 2022 dimuat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Jurnal Uang Masuk BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang
Desember 2022**

Perkiraan yang di Debit			Perkiraan yang di Kredit		
11	Kas	21.768.000	11	Kas	-
			12	Tabungan di bank	-
			13	Piutang anggota	5.721.000
			14	Persediaan (Ternak/Us.Ayam)	-
			15	Investasi	-
			16	Peralatan/barang inventaris	-
			17	Tanah	-

			18	Bangunan Mess dan Depot	-
			19	Sewa dibayar dimuka	-
			192	Akum cadangan kemacetan	-
			193	Akum penyusutan inventaris	-
			21	Hutang dari bank	-
			22	Hutang dari pihak lain	-
			23	Simpanan wajib	50.000
			24	Simpanan sukarela	-
			25	Dana pendidikan dan sosial	-
			26	Alokasi SHU pengurus	-
			27	Alokasi ke PADes	-
			31	Penyertaan modal desa	-
			32	Penyertaan modal lain (SHU)	-
			33	Penyertaan modal sendiri	-
			34	Hibah	-
			35	Asuransi	-

			36	Laba ditahan	-
			37	Laba tahun berjalan	-
			41	H. Usaha jasa pinjaman	2.572.000
			42	H. Usaha Mess desa	4.000.000
			43	H. Usaha BRI Link	4.025.000
			44	H. Usaha depot air	5.400.000
			45	Pendapatan lain-lain	-
			46	Sewa stand/lapak	-
			47	Bunga tabungan bank	-
			48	Denda	-
			49		-
	Jumlah kas	21.768.000		Jumlah kas	21.768.000

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

Pada tabel 4.1 merupakan penyajian laporan keuangan yang berupa jurnal masuk periode Desember 2022 yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang yang dimana terdapat di kas sebesar Rp.21.768.000.

Tabel 4.2
Jurnal Uang Keluar BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang
Desember 2022

Perkiraan yang di Debit			Perkiraan yang di Kredit		
11	Kas	-	11	Kas	20.879.850
12	Tabungan di bank	-			
13	Piutang anggota	7.000.000			
14	Persediaan (Ternak/Us. Ayam)	-			
15	Investasi	-			
16	Peralatan/Barang Inventaris	-			
17	Tanah	-			
18	Bangunan Mess dan Depot	-			
19	Sewa dibayar dimuka	-			
192	Akum cadangan kemacetan	-			

193	Akum penyusutan inventaris	-			
21	Hutang dari bank	-			
22	Hutang dari pihak lain	-			
23	Simpanan wajib	-			
24	Simpanan sukarela	-			
25	Dana pendidikan dan sosial	28.000			
26	Alokasi SHU pengurus	139.950			
27	Alokasi ke PADes	167.960			
31	Penyertaan modal desa	-			
32	Penyertaan modal lain (SHU)	223.940			
33	Penyertaan modal sendiri	-			
34	Hibah	-			

35	Asuransi	-			
36	Laba ditahan	-			
37	Laba tahun berjalan	-			
51	Upah/honor pekerja	1.200.000			
52	Sewa kantor	-			
53	Transport	3.000.000			
54	ATK	2.060.000			
55	Beli air dan sewa mobil	1.800.000			
56	Pajak dan Adm bank	1.880.000			
57	Cadangan kemacetan	-			
58	Penyusutan inventaris	-			
59	Biaya lain-lain	3.380.000			
	Jumlah Kas	20.879.850	Jumlah Kas	20.879.850	

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

Pada tabel 4.2 merupakan penyajian laporan keuangan yang berupa jurnal uang keluar periode Desember 2022 yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang yang dimana terdapat pengeluaran sebesar Rp.20.879.850.

Tabel 4.3
Mutasi
Neraca
Des-22

Nama Perkiraan	Saldo Awal		Mutasi		Saldo Akhir	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
AKTIVA						
Kas	16.730.684		21.768.000	20.879.850	17.618.834	
Tabungan di bank	5.441.429		250.000.692	104.616	255.337.505	
Piutang anggota	54.400.400		7.000.000	5.721.000	55.679.400	
Persediaan (Ternak Ayam)	17.500.000				17.500.000	
Investasi						
Peralatan/brg inventaris	76.087.000				76.087.000	
Tanah						
Bangunan Mess dan Depot	238.275.000				238.275.000	
Sewa dibayar dimuka						
Akum cadangan kemacetan	103.601.000				103.601.000	
Akum peny. Inventaris						
Jumlah Aktiva	512.035.513		278.768.692	26.705.466	764.098.739	
PASIVA						
Hutang/ Kewajiban						
Hutang dari bank						
Hutang dari pihak lain						
Simpanan Wajib		1.815.000		50.000		1.865.000
Simpanan sukarela		500.000				500.000

Dana pendidikan dan sosial			28.000			(28.000)
Alokasi SHU pengurus			139.950			(139.950)
Alokasi ke PADes			167.960			(167.960)
Modal						
Penyertaan modal desa		505.000.000				505.000.000
Penyertaan modal lain (SHU)		4.160.663	223.940			3.936.723
Penyertaan modal sendiri						
Hibah				250.000.000		250.000.000
Asuransi						
Laba ditahan		559.850				559.850
Laba tahun berjalan				2.573.076		2.573.076
Jumlah Pasiva		512.035.513	559.850	252.623.076		764.098.739
PENDAPATAN						
H.Usaha jasa pinjaman				2.572.000		2.572.000
H.Usaha Mess desa				4.000.000		4.000.000
H.Usaha Bri Link				4.025.000		4.025.000
H.Usaha Depot air				5.400.000		5.400.000
Pendapatan lain-lain						
Sewa stand/lapak						
Bunga tabungan bank				692		692
Denda						
Jumlah pendapatan				15.997.692		15.997.692

BIAYA					
Upah honor pekerja			1.200.000		1.200.000
Sewa kantor					
Transport			3.000.000		3.000.000
ATK			2.060.000		2.060.000
Beli air dan sewa mobil			1.800.000		1.800.000
Pajak dan adm bank			1.984.616		1.984.616
Cadangan kemacetan					
Penyusutan inventaris					
Biaya lain-lain			3.380.000		3.380.000
Jumlah Biaya			13.424.616		13.424.616

Sumber : Laporan Keuangan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perbandingan kriteria pengakuan dan pengukuran laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah dengan kriteria laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang untuk mengetahui penyajian laporan keuangan tersebut sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah atau belum, berikut adalah hasil penelitian berupa perbandingan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan laporan keuangan BUM Desa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tabel 4.4

Perbandingan beberapa kriteria pengakuan dan pengukuran laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang

SAK EMKM	BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang	Kriteria
<p>Komponen Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Posisi Keuangan • Laporan Laba Rugi • Catatan Atas Laporan Keuangan 	<p>Komponen Laporan Keuangan berdasarkan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum membuat Laporan Posisi Keuangan berdasarkan SAK EMKM. • BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum membuat Laporan Laba Rugi. • BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum memiliki Catatan 	<p>Belum sesuai</p>

	Atas Laporan Keuangan.	
<p>Perbandingan pengakuan Laporan Posisi Keuangan :</p> <p>Paragraf 2.22 menyatakan, aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonomiknya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.</p>	<p>BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum membuat laporan posisi keuangan sehingga kas dan setara kas pada aset dicatat hanya dalam kas masuk dan kas keluar.</p>	<p>Belum sesuai</p>
<p>Paragraf 8.6 Entitas mengakui aset dan liabilitas keuangan hanya ketika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual aset dan liabilitas keuangan tersebut.</p>	<p>Pengakuan piutang anggota di akui oleh BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang sesuai dengan SAK EMKM dengan mencatat sebesar jumlah tagihan.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Perbandingan pengukuran Laporan Posisi Keuangan :</p> <p>SAK EMKM pada paragraf 2.16 menyatakan dasar pengukuran laporan keuangan adalah biaya historis.</p>	<p>Laporan keuangan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang tidak sesuai berdasarkan SAK EMKM dikarenakan BUM Desa belum membuat laporan posisi keuangan sesuai SAK EMKM.</p>	<p>Belum sesuai</p>

<p>Paragraf 8.7 berdasarkan SAK EMKM biaya perolehan aset dan liabilitas keuangan di ukur pada harga transaksi (<i>transaction price</i>). Contoh harga transaksi aset dan liabilitas keuangan adalah untuk piutang dan utang yang dimana harga transaksinya adalah sebesar jumlah tagihan.</p>	<p>Pengukuran piutang anggota di akui oleh BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang sesuai dengan SAK EMKM dengan mencatat sebesar jumlah tagihan.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Perbandingan pengakuan Laporan Laba Rugi : Paragraf 14.2 SAK EMKM menyatakan pendapatan diakui ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan.</p>	<p>BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang mengakui terkait pendapatan sesuai dengan SAK EMKM, namun hanya saja BUM Desa belum membuat laporan laba rugi.</p>	<p>Sesuai dengan catatan, namun belum membuat laporan laba rugi.</p>
<p>Perbandingan pengukuran Laporan Laba Rugi : Paragraf 14.3 SAK EMKM menyatakan entitas mencatat manfaat ekonomik</p>	<p>Pengukuran pendapatan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang sesuai berdasarkan SAK EMKM yaitu mencatat pendapatan yang diterima, namun hanya saja belum</p>	<p>Sesuai dengan catatan, namun belum membuat laporan laba rugi</p>

yang diterima atau yang masih harus diterima bruto.	membuat laporan laba rugi.	
<p>Catatan Atas Laporan Keuangan :</p> <p>Paragraf 6.1 SAK EMKM mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya.</p> <p>Paragraf 6.2 SAK EMKM menyatakan penyajian Catatan Atas Laporan keuangan meliputi : (1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, (2) ikhtisar kebijakan akuntansi, dan (3) informasi tambahan dan rincian pos tertentu menjelaskan transaksi penting dan materil sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.</p>	<p>BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang dalam penyajian laporan keuangan belum membuat Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM, dikarenakan keterbatasan pemahaman mereka dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.</p>	<p>Belum sesuai</p>

C. PEMBAHASAN

1. Penyajian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses transaksi dari Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang dalam mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Melalui laporan keuangan pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat berkomunikasi dengan data keuangan atas usaha yang dijalankan. Laporan keuangan sangat penting bagi Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang, karena dapat memberikan informasi keuangan dan hasil yang di dapat oleh Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang sehingga dari laporan keuangan ini dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan bagi pihak yang bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang, sehingga penyusunan laporan keuangan harus maksimal untuk memenuhi syarat dalam akuntansi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara BUM Desa yang mengatakan *“dalam melakukan penyajian laporan keuangan kami belum sepenuhnya berjalan sempurna, kami menyajikan laporan keuangan masih sangat sederhana”*. Dan berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menganalisis bahwa sejauh ini Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang dalam melakukan penyusunan laporan keuangan belum sempurna yang sesuai standar akuntansi pada umumnya. Karena dalam melakukan penyusunan laporan keuangannya, Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang masih sangat sederhana yaitu melakukan pencatatan uang keluar, uang masuk, dan mencatat mutasi neraca. BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang perlu melakukan pencatatan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dalam BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang juga diperlukan pihak yang mengerti mengenai Standar Akuntansi dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan pihak BUM Desa memiliki kekurangan dalam kemampuan dan pemahaman mengenai Standar Akuntansi, serta tidak adanya mengenai

pelatihan tersebut. Walaupun demikian, BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang sudah melakukan pencatatan laporan keuangan sebaik mungkin agar dapat digunakan bagi pihak yang membutuhkan.

2. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah pada Penyajian Laporan Keuangan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan sangat lah penting bagi suatu organisasi ataupun usaha untuk mengetahui pelaporan keuangan dengan sebenarnya serta dapat membantu suatu organisasi ataupun usaha tersebut dalam mengambil keputusan. Maka di butuhkan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Berdasarkan hasil perbandingan komponen laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Catatan Atas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum sesuai dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM secara rinci.

Hasil perbandingan pengakuan dan pengukuran Laporan Posisi Keuangan berdasarkan SAK EMKM menunjukkan bahwa terdapat dua kriteria yaitu kriteria pengakuan dan pengukuran yang belum sesuai yang dimiliki BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang dan dua kriteria yang sesuai yaitu sesuai pengakuan dan pengukuran berdasarkan SAK EMKM. Sedangkan hasil perbandingan pengakuan dan pengukuran Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK EMKM menunjukkan bahwa BUM Desa mengakui pendapatan dan pengukuran pendapatan sesuai SAK EMKM namun BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan berdasarkan hasil perbandingan Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang menunjukkan bahwa BUM Desa Perkebunan

Bukit Lawang sama sekali belum ada Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil perbandingan kriteria Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan kriteria Laporan Keuangan BUM Desa diatas dikatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Perkebunan Bukit Lawang dalam penyajian Laporan Keuangan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang dikatakan belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah karena penyajian laporan keuangannya masih sangat sederhana yang menyajikan jurnal uang masuk, jurnal uang keluar dan mutasi neraca sehingga laporan keuangan BUM Desa perkebunan Bukit Lawang belum memenuhi kriteria pada SAK EMKM. Kesesuaian antara penerapan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku terhadap penerapan akuntansi yang dilakukan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang tidak sempurna. Karena masih banyak penerapan yang harus dilakukan oleh BUM Desa untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik yang dapat dijadikan informasi keuangan sesuai dengan SAK EMKM.

BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang belum melakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan sesuai dengan SAK EMKM terkendala dari pihak BUM Desa yang tidak mengetahui mengenai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku serta tidak adanya pelatihan dari pemerintah desa mengenai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Maka dari itu pihak BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang dalam menyusun Laporan Keuangan masih sangat sederhana sehingga tidak dapat dilakukan penerapan Standar Akuntansi.

Karena belum lengkapnya laporan keuangan BUM Desa, maka dari itu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan BUM Desa Perkebunan Bukit Lawang masih harus di perbaiki menjadi lebih lengkap agar laporan keuangan BUM Desa tersebut bermanfaat dan lebih mudah dijadikan sebagai

pedoman dalam mengambil keputusan. Sehingga, apabila laporan keuangan tersebut disusun lengkap sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku pada umumnya, maka dapat dilakukan penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Untuk melengkapi semua itu pemerintah desa hendaklah menetapkan orang yang mampu pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku pada umumnya, sehingga dapat menjadikan pelaporan keuangan BUM Desa menjadi lebih baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN